LAMPIRAN 4

Surat Setoran Pajak (SSP)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT WP : .....
.....

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....
.....

Kode Akun Pajak **Kode Jenis Setoran**

Uraian Pembayaran : .....
.....
.....
.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : ..... *Diisi dengan rupiah penuh*
Terbilang : .....
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
..... , **Tanggal** .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

LAMPIRAN 5

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) Atau Pasal 26

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NOMOR : ..... (2)

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		☐		
2.	Imbalan Distributor MLM		☐		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		☐		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		☐		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		☐		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		☐		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		☐		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		☐		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		☐		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		☐		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		☐		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
Jumlah					

Terbilang : .....

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

....., ... **20** ..... (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

LAMPIRAN 6

Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) Atau Pasal 26

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…… (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : …… (2)

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.			
	JUMLAH			

Terbilang : ……

*) Lihat petunjuk pengisian

……, …… 20 ……. (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

…… (6)

Perhatian :
1. *Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.*
2. *Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.*

F.1.1.33.02

LAMPIRAN 7

Formulir 1721 – A1

FORMULIR

1721 - A1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

TAHUN KALENDER: 2 0

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
:
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN ☐ KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : — **RUPIAH**

- **PENGHASILAN BRUTO :**
  1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT — 1
  2. TUNJANGAN PPh — 2
  3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA — 3
  4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA — 4
  5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA — 5
  6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 — 6
  7. JUMLAH (1 s.d. 6) — 7
  8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR — 8
  9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) — 9
- **PENGURANGAN :**
  10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 — 10
  11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 — 11
  12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT — 12
  13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) — 13
- **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**
  14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) — 14
  15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA — 15
  16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) — 16
  17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) — 17
  18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17) — 18
  19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN — 19
  20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA — 20
  21. PPh PASAL 21 TERUTANG — 21
  22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI — 22
     - 22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah — 22a
     - 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP — 22b
  23. JUMLAH PPh PASAL 21 :
     - ☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
     - ☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
     — 23
  24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
     - ☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
     - ☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
     — 24

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

☐ PEMOTONG PAJAK ☐ KUASA

(tempat) TGL BLN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

NPWP

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN 8

Formulir 1721 – A2

FORMULIR

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0

NOMOR URUT :
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN :
NPWP BENDAHARA :
NAMA BENDAHARA :
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :
NIP / NRP :
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :
:
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN :
STATUS DAN JENIS KELAMIN : ☐ KAWIN ☐ TIDAK KAWIN ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
- **PENGHASILAN BRUTO :**		
1. GAJI POKOK / PENSIUN	1	
2. TUNJANGAN ISTERI	2	
3. TUNJANGAN ANAK	3	
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	4	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	5	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	6	
7. TUNJANGAN BERAS	7	
8. TUNJANGAN KHUSUS	8	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	9	
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	10	
- **PENGURANGAN**		
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	11	
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	12	
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	13	
- **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	14	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	15	
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16	
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)	17	
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	18	
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	19	
20. JUMLAH PPh PASAL 21 : ☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) ☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)	20	

B. - **PEGAWAI TERSEBUT** : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☐ PENSIUN

C. **TANDA TANGAN BENDAHARA**

(Tempat) TGL BLN THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA
NAMA :
NIP/NRP :

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN 9

Daftar Pemotongan Pajak (Satu Masa Pajak)

Formulir 1721-I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____

☐ SATU MASA PAJAK
☐ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 _____ - _____ . _____

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

area staples

A.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
	NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
				NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.									
	2.									
	3.									
	4.									
	5.									
	6.									
	7.									
	8.									
	9.									
	10.									
	11.									
	12.									
	13.									
	14.									
	15.									
	16.									
	17.									
	18.									
	19.									
	20.									
	JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)									
B.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP : B.01 _____ ORANG									
C.	TOTAL (JUMLAH A + B)									

LAMPIRAN 10

Daftar Pemotongan Pajak (Satu Tahun Pajak) Formulir 1721-I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____

☐ SATU MASA PAJAK
☐ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 _____ - _____ . _____

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

area staples

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
	JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)								
B.	**PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP** : B.01 _____ **ORANG**								
C.	**TOTAL (JUMLAH A + B)**								

LAMPIRAN 11

Daftar Bukti Potong Tidak Final Formulir 1721-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____

NPWP PEMOTONG : H.02 _____ - _____ . _____

FORMULIR 1721 - II

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

area staples

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)								

LAMPIRAN 12

Daftar Bukti Potong Final Formulir 1721-III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____

NPWP PEMOTONG : H.02 _____ - _____ . _____

FORMULIR 1721 - III

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

area staples

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)							

LAMPIRAN 13

Formulir 1770 S

FORMULIR

1770 S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

TAHUN PAJAK 2 0

☐ SPT PEMBETULAN KE - ...

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : ☐ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT
NPWP ISTERI / SUAMI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..... [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ..... [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]	2
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ..... [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / ☐ K / ☐ K / I / ☐	7
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ..... [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]	9
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12
	13 a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI / b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (11-12)	13
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b
	15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	15
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16 ☐ a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) / ☐ b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (13-15) TGL LUNAS TGL BLN THN	16
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ■ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK c. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) d. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR ..... DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	18
G. LAMPIRAN	a. ☐ Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. ☐ Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. ☐ Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) d. ☐ Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT e. ☐	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA TANGGAL TGL BLN THN

NAMA LENGKAP :
N P W P :

TANDA TANGAN

F.1.1.32.18

FORMULIR

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK 2 0

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BUNGA		
2.	ROYALTI		
3.	SEWA		
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH		
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		
6.	PENGHASILAN LAINNYA		
	JUMLAH BAGIAN A	**JBA**	

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH		
2.	WARISAN		
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		
5.	BEASISWA		
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
	JUMLAH BAGIAN B	**JBB**	

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5. dst						
	JUMLAH BAGIAN C				**JBC**	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan :

*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikredilkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

FORMULIR

1770 S - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK 2 0

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
	JUMLAH BAGIAN A	**JBA**	

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5. dst					
		JUMLAH BAGIAN B	**JBB**		

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5 dst					
		JUMLAH BAGIAN C		**JBC**	

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-II

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.		Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)		(2)	(3)	(4)
A		PENGHASILAN NETO		
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]		
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]		
	3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]		
	4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]		
	5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]		
	6	JUMLAH **(1 + 2 + 3 + 4 - 5)**		
	7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]		
	8	JUMLAH PENGHASILAN NETO **(6 - 7)**		

No		Uraian		Nilai
(1)		(2)		(3)
B		JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI **[A.8.(3) + A.8.(4)]**		
C		PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	**[K / I /** ……. **]**	
D		PENGHASILAN KENA PAJAK **[B - C]**		
E		PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
	1	5% x ……		
	2	15% x ……		
	3	25% x ……		
	4	30% x ……		
		JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
F		PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI **[(A.8.(3) / B) x E]** [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		
G		PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI **[(A.8.(4) / B) x E]** [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		

……, …….. 20….

SUAMI

Nama : ……

NPWP : ……

Tanda Tangan

ISTERI

Nama : ……

NPWP : ……

Tanda Tangan

Formulir Perubahan Data ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan, dengan dilengkapi dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak mengalami perubahan.

A. FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Perubahan: ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Perubahan Data Secara Jabatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan Gelar Belakang

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Perubahan Kategori Wajib Pajak orang pribadi
   - ☐ 1. Orang Pribadi
   - ☐ 2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
   - ☐ 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
   - ☐ 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
   - ☐ 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)
2. Perubahan Identitas Wajib Pajak
   Nama Wajib Pajak

   Gelar Depan Gelar Belakang

   Tempat /Tanggal lahir (tgl-bln-thn) /

   Status Perkawinan ☐ 1 Kawin ☐ 2 Tidak Kawin

   Kebangsaan ☐ Indonesia NIK:

   ☐ Asing Negara Asal

   No. Paspor:

   Nomor Telepon/Handphone

   E-mail
3. Perubahan Sumber Penghasilan Utama

   ☐ Pekerjaan dalam hubungan kerja
   - ☐ 1. PNS
   - ☐ 2. TNI/POLRI
   - ☐ 3. Pensiunan
   - ☐ 4. Pegawai Swasta
   - ☐ 5. Pegawai BUMN/BUMD
   - ☐ 6. Pegawai Badan Publik
   - ☐ 7. Pejabat Negara/Daerah
   - ☐ 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
   - ☐ 9. Pegawai Lainnya Uraian .....

   KLU (diisi oleh petugas)

   ☐ Kegiatan Usaha

   KLU (diisi oleh petugas)

   Merk Dagang/Usaha

   Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

   Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

   ☐ Pekerjaan Bebas

   KLU (diisi oleh petugas)

   Merk Dagang/Usaha

   Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

   Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

   ☐ Lainnya

   KLU (diisi oleh petugas)

4. Perubahan Alamat
- ☐ Tempat Tinggal
- ☐ Domisili KTP
- ☐ Tempat Usaha

Alamat Baru:
Jalan
Blok
Nomor RT/RW /
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Nomor Telepon No. Faksimile

C PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

C.1. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN (kecuali Bendahara)

1. Perubahan Bentuk Badan
- ☐ 1. Perseroan Terbatas (PT)
- ☐ 2. Perseroan Komanditer (CV)
- ☐ 3. Perseroan lainnya
- ☐ 4. BUMN/BUMD
- ☐ 5. Firma (Fa)
- ☐ 6. Kongsi
- ☐ 7. Koperasi
- ☐ 8. Dana Pensiun
- ☐ 9. Persekutuan dan Perkumpulan
- ☐ 10.Yayasan
- ☐ 11. Organisasi massa
- ☐ 12. Organisasi sosial politik
- ☐ 13.Organisasi lainnya
- ☐ 14. Lembaga dan bentuk badan lainnya
- ☐ 15. Kontrak investasi kolektif
- ☐ 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Perubahan Permodalan/Kepemilikan ☐ PMA ☐ PMDN ☐ Pemerintah ☐ Lainnya

3. Perubahan Nama Wajib Pajak

4. Perubahan Alamat Tempat Kedudukan:
Jalan
Blok
Nomor RT/RW /
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Telepon/Faksimile dan E-mail :
Nomor Telepon No. Faksimile
E-mail

5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir:
Nomor Akte
Tempat/Tanggal Akte (tgl-bln-thn) /
Nama Notaris
Nomor Akte Perubahan

6. Perubahan Tahun Buku sd.

7. Perubahan Jenis Usaha / Kegiatan

(diisi oleh petugas)

8. Perubahan Merk Dagang/Usaha

9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab :

Nama

Jabatan

Kebangsaan ☐ Indonesia NIK:

☐ Asing Negara Asal

No. Paspor:

NPWP

Alamat domisili:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Propinsi

Kode Pos

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Handphone

E-mail

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

10. Nama Resmi Jabatan Bendahara

11. Nama Satuan Kerja/Instansi

12. Nomor Surat Penunjukan

13. Alamat Satuan Kerja/Instansi:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon/Faksimile: No. Faksimile

Identitas Pejabat Bendahara:

14. Nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara:

NIK/Nomor KTP

NPWP Orang Pribadi pejabat bendahara:

15. Alamat domisili:

Jalan

Blok

Nomor RT/RW /

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon No. Faksimile

Nomor Handphone

E-mail

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: ☐ Lengkap dan Benar Petugas, ... NIP.....	....., tanggal ..... Pemohon, ...

F.0.0.3.2....

LAMPIRAN 14

Formulir 1770 SS

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS

PERHATIAN :
- SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA " X " PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

H.01 ☐ SPT PEMBETULAN KE H.02 -.....

TAHUN PAJAK H.03 2 0 ☐ ☐

DIISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP I.01: _____ – _____ - _____

NAMA WAJIB PAJAK I.02: _____

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN

1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	1 A.01	
2	Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)	2 A.02	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ A.03 ☐ K/ A.04 ☐ K/I/ A.05 ☐ (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)	3 A.06	
4	Penghasilan Kena Pajak (1 – 2 – 3)	4 A.07	
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.08	
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.09	
7	a. A.10 ☐ Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 – 6) b. A.11 ☐ Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 A.12	

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8 B.01	
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02	
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03	

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01	
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01 _____ – _____ – _____
dd mm yyyy

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.